

## **Evaluasi Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Walikota Padang Tahun 2024 Melalui Analisis Video**

Sabar Aulia Rahman<sup>1\*</sup>, Eka Vidya Putra<sup>2\*</sup>, Syafira Aulia<sup>3</sup>, Savia Anggi Mustika Sari<sup>4</sup>, Rezki Amelia Safitri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ekavidyaputra@fis.unp.ac.id](mailto:ekavidyaputra@fis.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang 2024, debat publik berfungsi sebagai platform strategis untuk menilai visi, misi, dan program kandidat untuk menjawab tantangan lokal. Dengan menggunakan metode analisis isi, penelitian ini menganalisis bagaimana visi kandidat berhubungan dengan masalah strategis seperti lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Data dikodekan berdasarkan tema seperti inovasi teknologi dan transformasi sosial dari transkrip diskusi. Hasil menunjukkan bahwa calon yang menggabungkan inovasi, nilai lokal, dan teknologi memiliki peluang lebih besar untuk menyusun kebijakan yang relevan. Namun, masalah utama adalah implementasi teknis dan kesiapan infrastruktur. Studi ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan pendekatan holistik untuk meningkatkan komunikasi politik dan pembuatan kebijakan berkelanjutan yang inklusif. Terakhir, menjawab kebutuhan masyarakat secara strategis dan aplikatif memerlukan integrasi teknologi dan kearifan lokal.

Kata Kunci: Evaluasi; Debat Publik; Kota Padang.

### **Abstract**

In the 2024 mayoral election in Padang, public debates served as a strategic platform to evaluate candidates' visions, missions, and programs in addressing local challenges. Using content analysis methods, this study examines how candidates' visions align with strategic issues such as environmental management, socio-economic development, and governance. Data were coded based on themes such as technological innovation and social transformation from discussion transcripts. The findings indicate that candidates who integrate innovation, local values, and technology are more likely to design relevant policies. However, key challenges include technical implementation and infrastructure readiness. This study emphasizes the importance of adopting a holistic approach to enhance political communication and develop inclusive and sustainable policymaking. Ultimately, addressing community needs strategically and practically requires the integration of technology and local wisdom.

Keywords: Evaluation; Padang city; Public debate.

How to Cite: Rahman, S. A. et al. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Walikota Padang Tahun 2024 Melalui Analisis Video. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1 (2), 65-87.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

## Pendahuluan

Komunikasi politik merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan hubungan yang kokoh antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, komunikasi politik memainkan peran strategis dalam memperkenalkan visi, misi, dan program kerja seorang kandidat kepada khalayak. Untuk menyebarkan pengaruh dan dampak dari media baru, tentu dengan media sosial sebagai corongnya, internet menjadi medium yang paling tepat untuk melakukannya. Bentuk-bentuk media baru ini akan sangat membutuhkan kehadiran internet, apalagi media sosial yang eksistensinya sendiri dipengaruhi oleh jaringan internet. Makanya, untuk tujuan diseminasi informasi, kemajuan teknologi memiliki andil besar dalam pengembangan media massa dewasa ini. Dengan demikian, ranah multimedia (siber) dapat menciptakan sebuah iklim komunikasi politik yang konstruktif (Indrawan, et al 2023). Debat publik, sebagai medium utama komunikasi politik, memberikan ruang bagi kandidat untuk menyampaikan pemikiran secara terbuka, terstruktur, dan terukur. Dalam era modern ini, debat publik tidak hanya menjadi sarana pengujian kemampuan berbicara seorang kandidat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi solusi yang ditawarkan terhadap berbagai permasalahan lokal.

Pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi di internet, peran media menjadi semakin penting. Oleh karena itu, media telah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan ditemukannya perangkat multimedia berbasis internet, membuat informasi mudah ditemukan di belahan dunia ini, dengan mengakses informasi, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi dan lain-lain melalui internet. Berdasarkan fenomena tersebut, komunikasi yang awalnya hanya sebatas interaksi tatap muka antar individu, kini berkembang secara online dari internet. Dalam hal ini, salah satu media berbasis internet yang banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial adalah media online. Dengan munculnya media berbasis internet (media online), terjadi pergeseran penggunaan media yang awalnya klasik (media elektronik dan cetak) dan saat ini sedang mengalami peralihan ke internet yang baru. media. Media berbasis telah menjadi saluran untuk mengakses media sosial dengan berbagai cara. bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, serta politik, misalnya digunakan dalam kampanye pemilu untuk menyebarkan visi, misi, dan agenda (Majid, 2023).

Komunikasi politik berlangsung dalam konteks organisasi dan suasana politik. Seperti yang dikatakan Muleer (2013), komunikasi politik didefinisikan sebagai suatu kejadian yang bersifat politis ketika ditekankan oleh kejadian tersebut. Di sisi lain, bagi

mereka yang lebih menekankan pada penggunaan komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi politik diartikan sebagai komunikasi di dalam dan antar sistem dengan menggunakan lingkungannya. Ada hubungan penting antara komunikasi dan pencapaian tujuan politik, dan Graber (2011) mengakui bahwa beberapa kegiatan komunikasi politik adalah permainan kata-kata. Bagi Nimmo (2010): "Politisi sebagai komunikator politik memainkan posisi sosial manual dan secara manual menurun dalam membentuk opini publik. Politisi dan politisi berbicara atas nama organisasi dan kedutaan. Politisi harus mengusulkan dan/atau melindungi objek kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Dengan kata lain, komunikator politik dikelompokkan bersama sampai politisi mencari pengaruh melalui komunikasi. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena mereka berhasil terlibat dalam dialog yang menarik dengan pemilih dan elit politik. Tidak hanya itu, hal ini juga tergantung pada efektivitas komunikasi Anda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam komunikasi politik selalu ada proses pertukaran pesan yang diusahakan oleh komunikator politik (Priadi & Thariq, 2023).

Debat disinyalir memerlukan kemampuan berbahasa yang baik dan tepat. Hal tersebut sejalan dengan gagasan Hanafi (2018); Rahmadhani (2020); Syadaruddin, DKK., (2017) bahwa dalam debat terdapat pemaparan adu argumen antar pasangan calon atau peserta debat yang bertujuan mempengaruhi orang lain. Atas dasar itu kemampuan berbahasa menjadi modal utama dalam melakukan debat (Krisnawati, 2019; Melasarianti, 2018; Nurdiawati, 2020). Debat sebagai kegiatan yang direncanakan biasanya jarang ditemukan kesalahan berbahasa. Hal itu, dipengaruhi oleh kesiapan peserta debat dalam mengemukakan pendapat, sehingga lancar dan tidaknya ujaran yang dilakukan oleh para peserta debat sangat dipengaruhi oleh kesiapan peserta debat (Munawaroh, Karim, & Setiawan 2022).

Dalam konteks Indonesia, pentingnya debat politik semakin meningkat mengingat kompleksitas isu-isu yang harus dihadapi oleh kepala daerah. Isu strategis seperti pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi perhatian utama masyarakat. Kota Padang, sebagai salah satu kota besar di Sumatera Barat, menghadapi tantangan serupa. Kota ini memiliki sejarah budaya yang kuat dengan prinsip adat "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang menjadi landasan utama kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat dalam debat publik harus mencerminkan nilai-nilai budaya tersebut sekaligus menawarkan solusi konkret untuk permasalahan yang ada.

Seiring perkembangan teknologi, debat publik juga berkembang menjadi platform yang lebih interaktif. Kandidat tidak hanya menyampaikan visi dan misi secara konvensional, tetapi juga dituntut untuk memanfaatkan data dan teknologi dalam merancang solusi. Konsep "Kota Pintar" atau smart city menjadi salah satu inovasi yang sering diusung dalam debat politik modern. Implementasi teknologi dalam tata kelola kota menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Suharto et al., (2020) menganalisis debat Pilkada Jawa Timur 2018 dengan pendekatan wacana kritis. Mereka menemukan bahwa pasangan calon nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, menunjukkan keunggulan dalam menggunakan serangan berbasis data empiris yang kuat, menghasilkan argumentasi yang berpengaruh dan meyakinkan. Sebaliknya, pasangan nomor urut 2, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, dianggap kurang mampu mempertahankan diri karena minimnya penggunaan data empiris dalam argumentasi mereka, sehingga memberikan kesan argumentasi yang lemah, retorika politik pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh Arsani et al., (2020) mencatat bahwa pasangan ini menerapkan gaya retorika yang lebih terbuka, termasuk memberikan pujian kepada lawan debat mereka, suatu pendekatan yang membedakannya dari kandidat lain yang cenderung lebih birokratis dan formal dalam penyampaian argumen mereka, menyoroti kampanye negatif yang terjadi dalam debat publik Pilwali Makassar 2020, oleh Fadhli et al., (2024) analisis menunjukkan bahwa kandidat non-petahana mendominasi kampanye negatif dengan menyerang kebijakan petahana, sementara pasangan petahana lebih banyak melancarkan serangan personal terhadap lawannya. Fenomena ini menunjukkan perbedaan pendekatan strategi antara petahana dan non-petahana dalam memengaruhi preferensi pemilih, memanfaatkan algoritma Yulianita, (2024) dengan Support Vector Machine (SVM) untuk menganalisis sentimen komentar pada video debat Pilkada yang diunggah di YouTube. Komentar dari pengguna diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi tim kampanye untuk memahami persepsi publik dan merancang strategi komunikasi yang lebih efektif berdasarkan data,. Pilkada jawabarot Suharto et al., (2020) mengungkapkan bahwa seluruh pasangan calon lebih memilih strategi aman dengan menonjolkan kelebihan diri mereka (acclaim) serta rencana masa depan (future plans). Tidak ada kandidat yang menggunakan strategi serangan (attack) terhadap lawan maupun pertahanan (defense)

untuk menyangkal tuduhan. Fokus pada visi dan misi ini menunjukkan kehati-hatian kandidat dalam membangun citra di hadapan publik

Meskipun penelitian-penelitian ini sangat bermanfaat, literatur masih kurang. Banyak studi hanya membahas aspek umum debat politik, tetapi tidak banyak yang membahas bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat dimasukkan ke dalam pendekatan komunikasi kandidat. Selain itu, sedikit yang membahas peran teknologi dalam meningkatkan debat politik lokal secara khusus. Dalam konteks Kota Padang, penting untuk memikirkan bagaimana kandidat dapat memasukkan prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" ke dalam komunikasi politik mereka.

Dengan menganalisis diskusi publik tentang pemilihan kepala daerah Kota Padang 2024, artikel ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut. Dengan mempertimbangkan masalah strategis yang relevan, nilai-nilai budaya lokal, dan kemajuan teknologi, penelitian ini akan menekankan bagaimana kandidat mengelaborasi visi dan misi mereka. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur komunikasi politik, terutama di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika perdebatan politik di Kota Padang dan memberikan saran praktis untuk kandidat, akademisi, dan praktisi politik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi politik yang berbasis lokal, relevan, dan efektif selama pemilihan kepala daerah. Akibatnya, penelitian ini memberikan manfaat praktis dan teoretis bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan standar komunikasi politik di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Analisis Isi adalah metode sistematis untuk menilai konten komunikasi verbal, tertulis, atau visual dengan tujuan untuk memahami pola, tema, dan maknanya (Martono, 2010). Dalam konteks debat publik dalam Pilkada Kota Padang, pendekatan ini sangat relevan untuk menemukan gaya argumentasi, relevansi topik, dan tingkat komunikasi yang efektif yang disampaikan oleh pasangan calon. Analisis dimulai dengan mengumpulkan data dari transkrip debat. Ini mencakup visi, misi, dan program kerja kandidat. Data kemudian disusun berdasarkan tema utama, seperti transformasi sosial, pendidikan, mitigasi bencana, dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, dilakukan pengkodean tematik untuk memastikan bahwa setiap pasangan calon akan berkonsentrasi pada topik tertentu. Contoh topik ini termasuk pengelolaan sampah dan strategi pengentasan kemiskinan.

Pada langkah berikutnya, pernyataan kandidat dianalisis untuk menilai relevansinya dengan tema debat, tingkat argumentasi yang baik, dan kedalaman elaborasi program. Misalnya, pasangan calon yang menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan akan dinilai berdasarkan seberapa praktis dan aplikatif rencana mereka. Analisis ini juga memasukkan pola komunikasi kandidat seperti kearifan lokal, data empiris, dan retorika. Hasil dari metode Analisis Isi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pasangan calon merancang dan menyampaikan solusi strategis untuk masalah Kota Padang. Metode ini juga membantu menentukan kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk menerapkan program kerja yang mereka usulkan. Oleh karena itu, analisis isi memberikan kontribusi ilmiah untuk pemahaman dinamika demokrasi lokal dan merupakan alat yang berguna untuk menilai secara objektif kualitas debat publik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Keterkaitan Visi, Misi, dan Program dengan Isu Strategis Kota Padang**

Debat publik pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2024 memberikan gambaran menarik tentang bagaimana masing-masing pasangan calon menghubungkan visi, misi, dan program kerja mereka dengan isu-isu strategis yang dihadapi kota. Tema besar debat, yakni "Padang Melayani untuk Kemakmuran Masyarakat dalam Memperkokoh Keindonesiaan," menghadirkan peluang untuk menilai sejauh mana kandidat memahami kebutuhan masyarakat dan bagaimana mereka menawarkan solusi nyata. Dalam konteks ini, isu strategis yang menjadi sorotan meliputi pengelolaan lingkungan, transformasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta pelestarian nilai budaya lokal.

Salah satu isu utama yang banyak disorot adalah pengelolaan lingkungan, terutama mitigasi banjir, pengelolaan sampah, dan perlindungan ruang terbuka hijau. Kandidat nomor satu, Fadly Amran dan Maigus Nasir, menekankan pentingnya konsep "Smart City" atau Kota Pintar untuk mengatasi masalah lingkungan secara modern dan efisien. Mereka menawarkan strategi seperti digitalisasi transportasi umum, pemantauan emisi kendaraan secara real-time, dan optimalisasi pengelolaan sampah. Pendekatan ini menunjukkan visi untuk membawa Kota Padang menjadi kota yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Namun, kritik utama terhadap pasangan ini adalah minimnya detail teknis dan rencana implementasi yang konkret, sehingga timbul keraguan apakah gagasan besar ini dapat diwujudkan.

Sementara itu, pasangan calon nomor dua, Muhammad Iqbal dan Amasrul, lebih mengutamakan pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan lingkungan. Mereka mengusulkan peningkatan peran masyarakat melalui program-program berbasis kearifan lokal, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan kumuh dan

edukasi mengenai pentingnya kebersihan. Salah satu gagasan yang diusulkan adalah mendirikan shelter untuk korban banjir di daerah rawan sebagai bentuk mitigasi bencana yang lebih manusiawi. Meskipun ide ini menarik, pasangan ini kurang memberikan gambaran teknis tentang bagaimana implementasi akan dilakukan.

Pasangan nomor tiga, Hendri Septa dan Hendra Hidayat, fokus pada kelanjutan program-program yang telah mereka jalankan selama 2,5 tahun terakhir. Mereka menyoroti keberhasilan pengembangan infrastruktur, termasuk revitalisasi pasar dan pengelolaan sampah dengan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel), yang memungkinkan sampah diolah menjadi energi. Strategi ini menarik karena memberikan solusi konkret untuk permasalahan sampah, meskipun kritik muncul karena pasangan ini kurang memaparkan inovasi baru dan lebih banyak mengulang program-program yang telah berjalan.

Dari ketiga pasangan calon, terlihat bahwa isu lingkungan memerlukan pendekatan yang integratif. Sebuah strategi yang menggabungkan teknologi canggih dengan kearifan lokal dapat menjadi solusi yang ideal. Namun, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan anggaran, dan koordinasi lintas sektor.

Selain lingkungan, transformasi ekonomi menjadi perhatian utama dalam debat publik. Pasangan nomor satu menawarkan visi ekonomi yang progresif melalui pengembangan UMKM berbasis teknologi dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda. Mereka mengusulkan program "Padang Amanah," yang mencakup pendirian rumah UMKM dan pelatihan keterampilan vokasi. Gagasan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, minimnya rincian pelaksanaan kembali menjadi tantangan bagi pasangan ini.

Pasangan nomor dua, di sisi lain, berfokus pada pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan yang lebih konvensional tetapi relevan, seperti penyediaan modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil. Mereka juga menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan Kota Padang sebagai kota pendidikan, dengan fokus pada peningkatan keterampilan siswa melalui sekolah kejuruan. Namun, pasangan ini kurang memberikan gambaran tentang bagaimana program tersebut dapat menjangkau masyarakat luas dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Pasangan nomor tiga menekankan kesinambungan program-program sebelumnya, seperti pelatihan keterampilan bagi kaum muda dan bantuan modal usaha tanpa bunga. Mereka juga mempromosikan pengembangan Kota Padang sebagai kota festival untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendekatan

ini menjanjikan, tetapi kurang memberikan inovasi yang relevan untuk tantangan ekonomi saat ini.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, semua pasangan calon menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pasangan nomor satu mengusulkan reformasi birokrasi berbasis teknologi untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan efisien. Mereka menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengangkatan pejabat publik dan penghapusan praktik korupsi. Namun, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada komitmen politik yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak.

Pasangan nomor dua lebih menekankan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk mengatasi masalah birokrasi. Mereka juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang adil dan bebas dari kepentingan politik. Pasangan ini menawarkan visi yang realistis, tetapi kurang memberikan langkah-langkah spesifik untuk mewujudkannya.

Pasangan nomor tiga menyoroti pencapaian mereka dalam meningkatkan kinerja birokrasi selama masa jabatan mereka. Mereka mengklaim telah berhasil menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Namun, kritik muncul karena pasangan ini terlalu fokus pada keberhasilan masa lalu tanpa menawarkan visi baru yang dapat membawa perubahan signifikan.

Isu sosial budaya juga menjadi elemen penting dalam debat publik. Semua pasangan calon sepakat tentang pentingnya pelestarian nilai-nilai adat dan agama sebagai dasar pembangunan Kota Padang. Pasangan nomor satu mengusulkan integrasi nilai-nilai adat dengan program pendidikan melalui masjid dan lembaga bahasa. Mereka menekankan pentingnya membentuk karakter generasi muda yang berbasis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Pasangan nomor dua menyoroti pentingnya peran lembaga adat dalam memperkuat identitas budaya masyarakat. Mereka juga mengusulkan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi lokal, seperti program budaya berbasis komunitas. Namun, pasangan ini kurang memberikan penjelasan tentang bagaimana program tersebut dapat diintegrasikan dengan kebijakan modern.

Pasangan nomor tiga, di sisi lain, menekankan kesinambungan program sosial budaya yang telah mereka jalankan, seperti pendidikan karakter berbasis adat dan agama. Mereka juga mempromosikan pengembangan Padang sebagai kota yang ramah keluarga dan anak. Strategi ini menarik, tetapi kurang memberikan elemen inovasi yang dapat menarik generasi muda untuk lebih terlibat dalam pelestarian budaya. Sebagaimana

yang disampaikan oleh (Besli and Solosumantro 2024) Suatu kajian analitis kebudayaan semestinya tidak hanya sampai pada makna atau istilah adat yang mentradisi, tetapi juga menghasilkan suatu relevansi kehidupan sosial-budaya masyarakat yang mampu membaca kehidupan di bidang-bidang lainnya juga.

Berdasarkan analisis ini, terlihat bahwa keberhasilan visi, misi, dan program kerja kandidat sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengintegrasikan pendekatan modern dan lokal secara seimbang. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi harus didukung oleh pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Harold D. Lasswell mengungkapkan Model Analisis Komunikasi sebagai "who says what in what channel to whom with what effect" yang bila diurai sebagai siapa (komunikator) mengatakan apa (pesan), melalui saluran apa (media), kepada siapa (khalayak) dengan akibat (efek) apa (Ma'mun 2023). Di sisi lain, pendekatan berbasis adat dan agama membutuhkan langkah-langkah konkret untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan yang aplikatif dan relevan dengan tantangan modern.

Kesimpulannya, debat publik pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap pasangan calon memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk menciptakan Kota Padang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menggabungkan visi besar dengan rencana implementasi yang jelas dan realistis. Dukungan masyarakat dan kolaborasi antara berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut.

### **Respons terhadap Isu Sosial dan Ekonomi Lokal**

Isu sosial dan ekonomi selalu menjadi sorotan utama dalam setiap diskusi publik karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pasangan calon mengusulkan berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi-strategi ini mencakup revitalisasi pasar tradisional, pengembangan pusat ekonomi baru, pemberdayaan sektor informal, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang berdampak pada perekonomian Indonesia yaitu resesi ekonomi. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (AKTAVIANA et al. 2023)

Revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk menghidupkan kembali roda ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan memperbaiki infrastruktur pasar dan

menyediakan fasilitas modern, pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern sekaligus mempertahankan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, pengembangan pusat ekonomi baru bertujuan menciptakan area yang dapat menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru. Langkah ini diharapkan mengurangi ketimpangan ekonomi di antara wilayah-wilayah dalam kota.

Pemberdayaan sektor informal juga menjadi perhatian penting. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor ini, seperti pedagang kecil, pengrajin, dan pekerja sektor jasa. Dengan memberikan pelatihan keterampilan, masyarakat yang bekerja di sektor informal dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keberadaan fasilitas pendukung seperti pusat pelatihan yang memadai dan akses informasi yang efektif.

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi unggulan yang disoroti oleh pasangan calon. Melalui pemberian akses modal yang lebih mudah, insentif pajak, dan pengurangan ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih cepat. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada dukungan finansial, tetapi juga pada pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.

UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena keberadaan UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan UMKM terbukti saat terjadi krisis moneter tahun 1998 banyak usaha-usaha besar yang berjatuh namun UMKM tetap bertahan dan bahkan bertambah jumlahnya. Dengan begitu besarnya andil UMKM dalam menopang perekonomian suatu negara sehingga keberadaan UMKM sangat diharapkan oleh suatu negara manapun karena perannya yang vital dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdirinya usaha di sektor UMKM mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang siap bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berkembangnya pertumbuhan di sektor usaha mikro semakin terbukanya kesempatan peluang kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Al Farisi, Iqbal Fasa, and Suharto 2022).

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat mencakup upaya mengurangi ketergantungan pada rentenir dan pinjaman online berbunga tinggi yang kerap membebani ekonomi masyarakat kecil. Pemberdayaan mempunyai peran dalam

pengentasan masalah kemiskinan mulai dari ranah mikro (Suhandi 2023). Dengan memperkenalkan skema pinjaman tanpa bunga atau berbasis syariah, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan yang lebih terjangkau. Strategi ini dinilai penting untuk mendorong stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga dan komunitas.

Namun demikian, berbagai program ini tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang matang dan data yang akurat. Kebijakan berbasis bukti menjadi kunci untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar efektif. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dari setiap program yang dilaksanakan. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan data akurat, penggunaan teknologi dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi solusi. Smart city, sebagai salah satu visi calon pemimpin, dapat mendukung pengumpulan data secara real-time melalui sensor, survei digital, dan platform berbasis aplikasi. Dengan data yang terkonsolidasi, pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam dan menyusun kebijakan yang lebih relevan.

Dari sisi pelaksanaan, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pengusaha lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat implementasi program-program tersebut. Misalnya, dalam pengembangan UMKM, pemerintah dapat bermitra dengan institusi keuangan untuk menyediakan akses modal yang lebih baik. Sementara itu, sektor pendidikan dapat bekerja sama dengan dunia industri untuk menyusun kurikulum pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain langkah-langkah tersebut, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian. Pasangan calon menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak hanya membawa manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang positif. Misalnya, dalam pengembangan pusat ekonomi baru, diperlukan analisis lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak ekosistem lokal.

Penanganan isu sosial juga memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial memerlukan intervensi yang holistik. Program pelatihan keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja harus disertai dengan kebijakan jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Misalnya, program beasiswa untuk pelajar kurang mampu,

asuransi kesehatan gratis, dan subsidi untuk kebutuhan dasar dapat membantu masyarakat bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat krusial. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Peranan pemerintah daerah sebagai stabilisator dan fasilitator juga sangat diperlukan sebagai penguasa wilayah untuk menjembatani dan menyeimbangkan antara keinginan pelaku bisnis dan kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik di dalam pengelolaan program tersebut. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program harus menjadi prioritas utama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Mujaini, Setiati, and Pagawak 2022).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak yang efisien dan mendorong investasi. Namun, optimalisasi ini harus dilakukan tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok yang sudah rentan secara ekonomi.

Pada akhirnya, respons terhadap isu sosial dan ekonomi lokal harus berpusat pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan perencanaan strategis, data yang akurat, dan kolaborasi yang erat, tantangan sosial dan ekonomi yang ada dapat diubah menjadi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

### **Pendekatan Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang diusulkan oleh para kandidat dalam debat publik. Kearifan lokal tidak hanya memberikan landasan moral dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui nilai-nilai budaya yang telah diwariskan. Dalam konteks Kota Padang, prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menjadi salah satu landasan utama yang diusulkan untuk diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan. Prinsip ini menekankan harmoni antara adat dan agama sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan diharapkan dapat ditingkatkan.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Putu Ayu Sita Laksmi and I Gde Wedana Arjawa 2023). Namun, penerapan kearifan lokal ini tidak

dapat berdiri sendiri. Analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional perlu dilengkapi dengan inovasi modern agar tetap relevan menghadapi tantangan kontemporer. Salah satu strategi yang diusulkan adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip adat dengan teknologi modern untuk menciptakan kebijakan yang lebih efisien dan inklusif. Sebagai contoh, digitalisasi pengelolaan anggaran daerah dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pendekatan ini juga memerlukan kompatibilitas dengan kerangka hukum nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sinergi antara kearifan lokal dan hukum nasional menjadi kunci utama untuk menciptakan tata kelola yang harmonis. Misalnya, pelibatan elemen adat dalam perumusan kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap dihormati tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum modern.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Untuk itu, diperlukan platform atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah, misalnya melalui forum konsultasi publik atau aplikasi digital berbasis komunitas.

Salah satu contoh nyata dari penerapan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan adalah pembentukan Dubalang Kota yang diusulkan oleh salah satu pasangan calon. Dubalang Kota adalah tim yang bertugas meningkatkan ketertiban umum melalui pendekatan persuasif berbasis nilai-nilai adat Minangkabau. Konsep ini tidak hanya memperkuat fungsi keamanan, tetapi juga menciptakan harmoni dalam masyarakat dengan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, Dubalang Kota dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat pemerintah, sehingga mempermudah komunikasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.

Namun, penerapan kebijakan berbasis adat seperti Dubalang Kota juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa kebijakan ini tetap inklusif dan tidak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dalam masyarakat yang semakin plural, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat yang diterapkan tidak hanya mewakili kepentingan mayoritas, tetapi juga menghormati keberagaman yang

ada. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan fleksibel dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks Kota Padang, kearifan lokal juga dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti pengelolaan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan pendidikan. Sebagai contoh, nilai-nilai adat dapat digunakan untuk mendukung program-program pelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi. Selain itu, prinsip-prinsip adat yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab dapat menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun, untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan implementasi yang konsisten. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini tidak hanya berguna untuk memperbaiki kekurangan yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sebagai tambahan, penggunaan teknologi modern seperti aplikasi berbasis komunitas dapat mempermudah implementasi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah, memberikan masukan, atau bahkan berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kearifan lokal tidak hanya menjadi prinsip yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal juga dapat memberikan keuntungan dalam hal membangun citra Kota Padang sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai budaya. Dengan memadukan tradisi dan inovasi modern, Kota Padang dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas lokal mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat solidaritas sosial dan kohesi komunitas.

Kesimpulannya, pendekatan berbasis kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan merupakan strategi yang potensial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan inovasi modern, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan kompatibilitas dengan kerangka hukum nasional. Dengan pendekatan yang tepat, kearifan lokal dapat menjadi aset

berharga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Padang.

### **Integrasi Teknologi dalam Pelayanan Publik**

Integrasi teknologi dalam pelayanan publik menjadi salah satu tema sentral dalam debat pemilihan wali kota. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, digitalisasi layanan publik dianggap sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, masyarakat dapat

mengetahui seputar informasi terbaru berdasarkan akses yang cepat di berbagai media sosial dan website baik itu pemerintah maupun swasta. Di era digital saat ini, pemerintah juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi (Pramesti and Mardhatillah 2023). Berbagai contoh penerapan teknologi telah diajukan oleh para kandidat, seperti sistem pengelolaan data berbasis cloud, aplikasi untuk pelaporan masalah kota, dan platform online untuk pengajuan izin usaha. Langkah-langkah ini mencerminkan visi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, meskipun teknologi menawarkan banyak peluang, implementasinya bukan tanpa tantangan. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah perlu memastikan bahwa perangkat keras dan lunak yang mendukung layanan ini tersedia secara merata di seluruh wilayah. Misalnya, daerah-daerah pinggiran kota yang sering kali memiliki akses internet yang terbatas harus menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur teknologi. Tanpa infrastruktur yang memadai, integrasi teknologi hanya akan memperlebar kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Selain kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Pelatihan bagi aparatur pemerintah harus menjadi agenda prioritas untuk memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Aparatur yang tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai cenderung menghambat proses transformasi digital. Oleh karena itu, program pelatihan yang berkelanjutan harus dirancang, mencakup tidak hanya penggunaan teknologi tetapi juga pengelolaan data dan pemecahan masalah berbasis digital.

Di sisi lain, inklusivitas harus menjadi prioritas utama dalam penerapan teknologi ini. Seluruh lapisan masyarakat harus dapat mengakses layanan publik berbasis teknologi tanpa hambatan. Ketimpangan digital, terutama di kalangan masyarakat yang kurang

terampil menggunakan teknologi, menjadi tantangan besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program edukasi digital yang menyeluruh. Program ini dapat mencakup pelatihan dasar tentang penggunaan aplikasi dan perangkat digital, serta penyediaan fasilitas publik seperti komputer dan internet gratis di balai-balai desa atau pusat layanan masyarakat. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dalam sistem layanan berbasis teknologi dapat meningkat secara signifikan.

Salah satu contoh aplikasi yang relevan adalah sistem pelaporan masalah kota berbasis teknologi. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai masalah, seperti jalan rusak, lampu lalu lintas mati, atau banjir, secara langsung kepada pemerintah. Dengan sistem ini, pemerintah dapat merespons keluhan masyarakat secara lebih cepat dan terarah. Selain itu, transparansi dalam penanganan masalah juga dapat ditingkatkan melalui fitur pelacakan laporan yang memungkinkan masyarakat melihat status penyelesaian masalah mereka.

Platform online untuk pengajuan izin usaha juga menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan digitalisasi proses perizinan, pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen secara manual. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan izin dapat mengurangi potensi korupsi dan pungutan liar, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

Namun, keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada faktor teknis. Aspek kebijakan dan regulasi juga memainkan peran penting. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung transformasi digital, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjaga kerahasiaan dan keamanan data mereka. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan siber harus menjadi bagian integral dari rencana digitalisasi.

Di tengah berbagai peluang dan tantangan ini, integrasi teknologi juga menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, platform konsultasi publik berbasis digital dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat terkait kebijakan tertentu. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, integrasi teknologi juga dapat mendukung pengumpulan dan analisis data secara real-time. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola tertentu, seperti area dengan tingkat pengangguran tinggi atau daerah rawan bencana.

Informasi ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Dalam konteks Kota Padang, visi untuk membangun smart city menjadi salah satu sorotan utama dalam debat. Konsep smart city mencakup berbagai aspek, mulai dari smart living yang fokus pada kesejahteraan masyarakat hingga smart environment yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penggunaan teknologi untuk memantau emisi kendaraan secara real-time dan mengelola transportasi umum secara lebih efisien. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengurangi polusi udara sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum.

Namun, untuk mewujudkan visi ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah dapat bermitra dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan solusi inovatif, sementara masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam sistem yang ada. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat implementasi teknologi tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulannya, integrasi teknologi dalam pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas tata kelola pemerintahan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, dan inklusivitas dalam penerapan teknologi. Dengan perencanaan yang matang, kolaborasi yang erat, dan komitmen yang kuat, Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang modern dan berkelanjutan, dengan pelayanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Strategi Komunikasi Politik untuk Mendukung Implementasi Kebijakan**

Dalam komunikasi politik untuk menyusun strategi komunikasi ada beberapa faktor penting yang diperhatikan. Pertama, mengenal segmen atau khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat dalam proses komunikasi saat kampanye yang mempunyai sasaran adalah khalayak, maka keberadaan mereka sama sekali tidak pasif melainkan aktif sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. Kedua, menyusun pesan yaitu dalam menentukan tema dan materi sebagai syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, sehingga mampu membangkitkan perhatian masyarakat pemilih (Z et al. 2023). Bukan hanya komunikasi politik saja yang dilakukan dengan

matang dalam menghadapi persaingan pada pemilihan, akan tetapi sebuah strategi juga diperlukan, guna dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Strategi komunikasi politik sangat diperlukan untuk persiapan dalam bersaing dengan lawan pasangan calon yang lain, serta membentuk citra yang positif dimata masyarakat. Dalam menghadapi pemilihan seperti ini, para pasangan calon, tim debat serta partai pengusung tentunya telah menyusun perencanaan dengan matang agar strategi yang diusungnya tepat sasaran atau berhasil (TETI 2023). Komunikasi politik memainkan peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang diusulkan oleh pasangan calon. Dalam debat publik, efektivitas strategi komunikasi sangat memengaruhi bagaimana visi, misi, dan program kerja diterima oleh masyarakat. Kandidat harus mampu menyampaikan pesan secara jelas, relevan, dan berbasis data untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meyakinkan pemilih akan kemampuan mereka dalam mewujudkan janji-janji kampanye. Selain itu, komunikasi politik yang baik harus bersifat dua arah, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam debat yang diselenggarakan di Kota Padang, berbagai pendekatan komunikasi politik terlihat dari gaya penyampaian pasangan calon. Misalnya, Pasangan Calon 1, Fadly Amran dan Maigus Nasir, mengedepankan komunikasi berbasis data dengan memanfaatkan statistik dan pencapaian konkret untuk mendukung argumen mereka. Penyajian data seperti ini memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang diusulkan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini perlu ditingkatkan dengan menambahkan narasi yang lebih emosional untuk membangun koneksi personal dengan audiens. Data yang terlalu teknis tanpa penjelasan yang kontekstual dapat membuat pesan sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Sebaliknya, Pasangan Calon 2, Muhammad Iqbal dan Amasrul, lebih menonjolkan pendekatan naratif dengan menyoroti isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, mereka banyak berbicara tentang masalah narkoba, HIV, dan tantangan generasi muda, yang relevan dengan audiens lokal. Pendekatan ini berhasil menarik perhatian karena menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya dukungan data empiris yang dapat memperkuat argumen mereka. Dalam debat, penting untuk menyeimbangkan antara narasi emosional dan bukti konkret agar pesan yang disampaikan lebih kredibel.

Pasangan Calon 3, Hendri Septa dan Hendra Hidayat, menggunakan pendekatan yang mengandalkan kesinambungan program sebelumnya. Mereka banyak menekankan pada keberlanjutan proyek-proyek yang telah dilaksanakan selama menjabat. Meskipun pendekatan ini menunjukkan konsistensi, analisis mengindikasikan bahwa gaya komunikasi mereka cenderung repetitif dan kurang inovatif. Untuk menarik perhatian masyarakat, pasangan calon ini perlu mempresentasikan inovasi atau program baru yang relevan dengan tantangan saat ini, bukan hanya mengulang capaian masa lalu.

Selain gaya komunikasi, media yang digunakan juga menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi politik. Di era digital, teknologi memberikan peluang besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Media sosial, misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau berbagai kelompok demografis. Pasangan calon di Kota Padang telah memanfaatkan platform ini untuk mempublikasikan program kerja mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial akurat dan bebas dari misinformasi. Kehadiran berita palsu atau narasi yang menyesatkan dapat merusak kredibilitas pasangan calon sekaligus menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dalam konteks debat publik, komunikasi politik yang efektif tidak hanya tentang bagaimana kandidat menyampaikan pesan mereka, tetapi juga bagaimana mereka merespons kritik dan masukan dari lawan politik maupun masyarakat. Misalnya, ketika Pasangan Calon 2 mengkritik tingginya angka pengangguran di Kota Padang, Pasangan Calon 3 merespons dengan menyebutkan pencapaian mereka dalam menciptakan lapangan kerja. Respons ini menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan posisi mereka sambil memberikan bukti konkret atas klaim mereka. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa semua pasangan calon perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan respons berbasis solusi yang lebih spesifik dan terukur.

Komunikasi politik yang inklusif juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam debat, hanya sedikit pasangan calon yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat secara eksplisit. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diusulkan, sehingga memudahkan implementasinya. Untuk itu, pasangan calon dapat mengusulkan platform digital atau mekanisme konsultasi publik sebagai alat untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Selain itu, komunikasi politik yang efektif memerlukan konsistensi antara visi, misi, dan program kerja. Masyarakat cenderung lebih percaya kepada kandidat yang

dapat menunjukkan kesinambungan antara apa yang mereka ucapkan dalam debat dan apa yang telah mereka capai di masa lalu. Pasangan calon yang pernah menjabat, seperti Hendri Septa dan Hendra Hidayat, memiliki keuntungan ini. Namun, mereka juga menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa program-program mereka mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas, bukan hanya melanjutkan proyek yang ada.

Kesimpulannya, strategi komunikasi politik yang efektif untuk mendukung implementasi kebijakan harus mencakup beberapa elemen utama. Pertama, penyampaian informasi harus berbasis data untuk meningkatkan legitimasi kebijakan. Kedua, narasi emosional perlu digunakan untuk membangun koneksi personal dengan audiens. Ketiga, media sosial dan teknologi digital harus dimanfaatkan secara optimal, tetapi tetap menjaga keakuratan informasi. Keempat, partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas dalam komunikasi politik. Dan terakhir, pasangan calon harus menunjukkan konsistensi antara visi, misi, dan program kerja mereka. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, pasangan calon dapat meningkatkan efektivitas komunikasi politik mereka sekaligus mendukung implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Hasil analisis dari debat publik pemilihan kepala daerah Kota Padang 2024 mengungkapkan berbagai pendekatan strategis yang diusulkan untuk menjawab isu-isu utama kota. Visi, misi, dan program yang disampaikan oleh para kandidat mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan di bidang lingkungan, sosial-ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat implementasi, inovasi, dan kejelasan teknis dari masing-masing program yang diusulkan.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi seperti "Kota Pintar" menjadi salah satu solusi yang paling menonjol. Digitalisasi layanan publik, pemantauan emisi kendaraan secara real-time, dan sistem transportasi berbasis aplikasi menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi tata kelola lingkungan. Meski demikian, kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan program ini. Sementara itu, integrasi nilai-nilai adat dan agama dalam kebijakan lingkungan memberikan landasan moral yang kuat, tetapi memerlukan strategi teknis yang lebih terukur agar dapat memberikan dampak nyata.

Pada isu sosial-ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM menjadi fokus utama. Strategi ini berpotensi mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh pengawasan dan kebijakan berbasis bukti. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada pengelolaan yang transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai kearifan lokal menunjukkan arah yang progresif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memastikan inklusivitas dalam penerapan teknologi.

Secara keseluruhan, debat publik ini menyoroti pentingnya integrasi antara teknologi, nilai-nilai lokal, dan inovasi strategis untuk menjawab tantangan Kota Padang. Pendekatan holistik yang menggabungkan elemen-elemen ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kebijakan yang relevan, aplikatif, dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Aktaviana, N., Awalia, A., Holilah, N., Silviani, V., & Muslim, A. (2023). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Selama Pandemi Covid-19 di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Abdi Nusa*, 3(2), 87–91. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v3i2.61>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>
- Arsani, A., Harmonis, El-Adawiyah, S., & Satispi, E. (2020). Retorika Politik Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat Pada Debat Politik Pilkada DKI Jakarta 2017. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(2), 75–91.
- Besli, E., & Solosumantro, H. (2024). Proses, Makna dan Relevansi Upacara Pongo dalam Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Lempe, Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 6(1), 49–59. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.73234>
- Fadhli, A., Ad, A., Fatima, J. M., & Mau, M. (2024). Kampanye Negatif dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020 (Analisis Isi Video Debat Publik Pilwali Tahun 2020 ). *Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip*

*Unbas (H-IKON)*, 1(1), 52-65.

- Indrawan, J., Elfrita Barzah, R., & Simanihuruk, H. (2023). Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 109–118. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4519>
- Ma'mun, A. R. (2023). Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16>
- Majid, N. (2023). Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum di Era Digital. *Perseptif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.62238/perseptifjurnalilmusosialdanhumaniora.v1i2.34>
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujaini, M., Setiati, W., & Pagawak, M. (2022). Sinergitas Antar Fasilitator, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Melalui Program Kampung Berseri Astra (KBA) Sebagai Upaya Pengembangan Kampung Enggros. *Accounting Profession Journal*, 4(2), 63–69. <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.54>
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306–2315. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2474>
- Pramesti, A. A., & Mardhatillah, Y. (2023). Efektivitas Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(1), 62–86. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i1.2851>
- Putu Ayu Sita Laksmi, & I Gde Wedana Arjawa. (2023). Kearifan Lokal Dalam Mendukung Pengembangan Industri Kreatif Di Provinsi Bali. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)* 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp1-15>
- Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1),

44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>

Suharto, T., Prasetyo, B. D., & Wulandari, M. P. (2020). Analisis Wacana Kritis Komunikasi Verbal pada Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 43–54.

TETI, A. (2023). Strategi Komunikasi Politik Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Paket SN-KT Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Malaka. *Jurnal Poros Politik*, 5(1), 24–32. <https://doi.org/10.32938/jpp.v5i1.1507>

Rismanto, R., & Yulianita, N. (2024). Analisis Wacana Komunikasi Verbal Pada Debat Pertama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2024. *ArtComm*, 7(2), 256-266.

Z, J., Priadi, R., & Thariq, M. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Sibolga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 453. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.453-460>